

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Selanjutnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sedangkan SILPA tahun berjalan merupakan selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan netto.
2. Alokasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Lima Tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,11%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kenaikan belanja pegawai.
3. Alokasi pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,02%. Sedangkan Pembiayaan yang diperoleh mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,085. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu lebih berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi (misalnya menertibkan pajak) dan ekstensifikasi (memprioritaskan retribusi daerah).
2. Pengalokasian anggaran sesuai paradigma baru harus sesuai dengan prioritas dan tuntutan masyarakat, di mana anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan/proyek yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menyusun anggaran belanja rutin perlu adanya standarisasi anggaran dan prioritas pada masing-masing unit kerja, sehingga dana yang teralokasi pada masing-masing unit kerja bisa mencukupi untuk menjalankan kegiatan unit kerja yang bersangkutan dan perlu adanya sosialisasi standarisasi yang dijadikan acuan yang baku guna menyusun alokasi anggaran untuk belanja agar setiap unit kerja dapat melakukan prioritas terhadap jenis kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan unit kerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri RI. 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Pres. Jakarta.
- Dispenda dan BPS Kota Bandar Lampung. *Dalam Angka BPS Propinsi Lampung. 2007*. Lampung Dalam Angka.
- Mamesah. 1995. *Kebijakan Ekonomi Publik*. Rhineka Cipta. Jakarta.
- Mangkosoebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003. *Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002*.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengurusan, serta pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomika Pembangunan. Bima Grafika.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2003. Bahan Ajar Keputusan Menteri Dalam Negeri  
No.29 Tahun 2002.